



Optimalisasi Penyerapan APBD Perangkat Daerah Melalui Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) di Kabupaten Ponorogo

Novia Eky Saputri¹, Wanda Intan Dwi Septiarini²,

Riawan³

Universitas Muhammadiyah Ponorogo ^{1,2}

e-mail: rusdi_hidayat.adbis@upnjatim.ac.id

Abstract

This Community Service Program aims to analyze and support the optimization of the implementation of the Monitoring, Evaluation, and Reporting System (SMEP) in enhancing the absorption of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Ponorogo Regency. The program was conducted at the Development Administration Division of the Regional Secretariat of Ponorogo Regency using a descriptive qualitative approach. Data were collected through direct observation of system utilization, interviews with relevant government officials, and documentation of monitoring and evaluation activities related to the performance of Regional Government Organizations (OPD). The results indicate that the implementation of SMEP contributes positively to improving transparency, accountability, and the effectiveness of OPD performance control, particularly in monitoring the physical and financial realization of programs on a regular basis. The system also supports integrated performance data presentation and serves as a foundation for data-driven decision-making. However, the implementation of SMEP still faces several challenges, including suboptimal system integration, limited human resource competencies in data analysis, and the insufficient use of evaluation results as a basis for subsequent program planning.

Keywords: SMEP, APBD Absorption, Monitoring and Evaluation, E-Government.

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus mendukung optimalisasi implementasi Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) dalam meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap penggunaan sistem, wawancara dengan aparatur terkait, serta dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan SMEP berkontribusi positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian kinerja OPD, khususnya dalam pemantauan realisasi fisik dan keuangan kegiatan secara berkala. Sistem ini juga mendukung penyajian data kinerja secara terintegrasi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun demikian, pelaksanaan SMEP masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain integrasi antar sistem yang belum optimal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam analisis data, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan program selanjutnya.

Kata Kunci: SMEP, Penyerapan APBD, Monitoring dan Evaluasi, E-Government.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan APBD menjadi tuntutan penting bagi setiap pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, permasalahan rendahnya tingkat penyerapan anggaran masih kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan program dan tidak optimalnya capaian pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Rendahnya penyerapan APBD sering kali disebabkan oleh lemahnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta kurang efektifnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Halim & Kusufi, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang andal menjadi kebutuhan strategis bagi pemerintah daerah. Sistem monitoring yang terintegrasi mampu menyediakan informasi realisasi anggaran dan kinerja program secara real-time, sehingga memudahkan pimpinan daerah dalam melakukan pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga sejalan dengan perkembangan *e-government* yang mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Indrajit, 2016).

Kabupaten Ponorogo melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, merespons tantangan tersebut dengan mengembangkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP). SMEP dirancang sebagai inovasi digital untuk memantau realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sistem ini memungkinkan proses pelaporan kinerja dilakukan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan keterlambatan pelaporan serta

meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

Penerapan SMEP juga sejalan dengan paradigma New Public Management yang menekankan pentingnya orientasi pada hasil, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik (Hood, 1995). Melalui SMEP, pengelolaan APBD tidak hanya dinilai dari besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian kinerja program dan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. SMEP diharapkan mampu mendorong terciptanya pembangunan daerah yang lebih terarah, berkualitas, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan deskriptif, yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo, berlokasi di Gedung Graha Krida Praja Lantai 3, Jalan Aloon-Aloon Utara No. 9, Ponorogo, selama periode 11 Agustus hingga 11 Desember 2025. Kegiatan pengabdian difokuskan pada pendampingan dan implementasi Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) sebagai inovasi digital untuk memantau realisasi fisik dan keuangan serta kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara real-time. Metode ini meliputi observasi langsung terhadap proses pengelolaan data kinerja, keterlibatan dalam pelaksanaan SMEP, partisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), serta dukungan terhadap kegiatan institusional dan sosial seperti peringatan Hari Kemerdekaan dan bakti sosial. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi guna mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo merefleksikan peran penting budaya organisasi dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial antar aparatur pemerintahan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi media internalisasi nilai-nilai kebangsaan, kerja sama, dan loyalitas institusional. Partisipasi aktif seluruh aparatur dalam kegiatan tersebut menciptakan ruang interaksi informal lintas unit kerja yang relatif jarang terjadi dalam rutinitas birokrasi yang bersifat formal dan hierarkis. Interaksi semacam ini berkontribusi terhadap terciptanya iklim kerja yang lebih inklusif dan suportif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan (Rahmawati et al., 2024). Kegiatan peringatan hari besar nasional

dapat dipahami sebagai bentuk team building yang efektif. Kegiatan kolektif yang dilandasi semangat nasionalisme mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi dan memperkuat komitmen aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Pegawai yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan organisasi cenderung menunjukkan tingkat motivasi, kedisiplinan, dan produktivitas yang lebih tinggi (Armstrong, 2020). Dengan demikian, kegiatan ini berfungsi sebagai instrumen nonformal dalam pengembangan soft skills aparatur, seperti komunikasi interpersonal, kerja sama tim, dan kecerdasan emosional, yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam sistem birokrasi yang berorientasi pada prosedur.

Aspek utama dalam kegiatan pengabdian ini adalah implementasi Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) Kabupaten Ponorogo sebagai inovasi digital dalam pengelolaan kinerja pembangunan daerah. Penerapan SMEP menandai pergeseran paradigma pengendalian pembangunan dari pendekatan manual dan periodik menuju sistem digital yang bersifat real-time dan terintegrasi. Transformasi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan penguatan e-government yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik (Heeks, 2006; Indrajit, 2016).

Fitur dashboard kinerja yang dimiliki SMEP menjadi komponen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Penyajian informasi realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk visual, seperti grafik dan indikator warna, memungkinkan pimpinan daerah dan pengelola program melakukan quick assessment terhadap capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visualisasi data terbukti mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi kompleks serta mempercepat proses analisis dibandingkan laporan naratif konvensional (Few, 2013). Dengan demikian, SMEP berperan sebagai alat bantu manajerial yang memperkuat fungsi pengendalian internal pemerintah daerah.

Sistem peringkat kinerja OPD yang dihasilkan secara otomatis oleh SMEP juga memberikan dampak signifikan terhadap perilaku organisasi. Mekanisme ranking berbasis indikator kinerja mendorong terciptanya kompetisi yang sehat antar-OPD dalam meningkatkan capaian program dan ketepatan pelaporan. Transparansi peringkat kinerja memperkuat prinsip akuntabilitas publik karena capaian setiap OPD dapat dipantau oleh pemangku kepentingan internal secara terbuka. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja yang transparan dapat meningkatkan motivasi aparatur serta mendorong budaya kerja berbasis hasil (result-oriented culture) (Iskandar et al., 2017; OECD, 2019).

Keunggulan lain dari SMEP adalah kemampuan menghasilkan laporan pembangunan secara otomatis, seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD),

Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PPD), dan Hasil Pembangunan Daerah (HPD). Otomatisasi pelaporan ini meningkatkan efisiensi birokrasi dengan mengurangi beban administratif yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Integrasi data dalam satu basis data yang sama juga meminimalkan risiko inkonsistensi informasi antar dokumen perencanaan dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan prinsip smart governance yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Nam & Pardo, 2011).

Sistem notifikasi dan reminder otomatis dalam SMEP terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan OPD dalam pelaporan kinerja. Mekanisme pengingat berbasis sistem mengurangi ketergantungan pada koordinasi manual dan memperkuat kepatuhan terhadap jadwal pelaporan. Dalam literatur manajemen kinerja, penggunaan digital reminders dipandang sebagai instrumen kontrol yang efisien karena mampu mempengaruhi perilaku organisasi tanpa menambah beban struktural (Iskandar et al., 2017). Proses bisnis SMEP dimulai dari penginputan data oleh OPD secara berkala, mencakup realisasi fisik, realisasi keuangan, kendala pelaksanaan, serta dokumentasi pendukung. Sistem kemudian melakukan validasi otomatis untuk mendeteksi anomali data, seperti ketidaksesuaian antara capaian fisik dan keuangan. Tahapan verifikasi manual oleh Bagian Administrasi Pembangunan berfungsi sebagai quality control guna memastikan akurasi dan kredibilitas data. Proses ini mencerminkan praktik good governance yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pengawasan administratif (Permendagri No. 77 Tahun 2020).

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Semarang menjadi bagian penting dari strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan implementasi SMEP. Pengembangan sistem informasi tanpa diimbangi peningkatan kompetensi pengguna berpotensi menimbulkan implementation gap (Heeks, 2006). Melalui pendekatan learning by doing, Bimtek memberikan pemahaman praktis mengenai pengoperasian sistem, analisis dashboard kinerja, serta penanganan kendala teknis. Investasi dalam pelatihan aparatur ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kesiapan dan adaptabilitas sumber daya manusia (Steps, 2004; OECD, 2020).

Kegiatan pengabdian ini juga mencakup pelaksanaan bakti sosial di sekitar Alun-Alun Ponorogo sebagai wujud nyata kepedulian sosial pemerintah daerah. Kegiatan ini mencerminkan peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator dan administrator, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi kolektif aparatur dalam kegiatan sosial memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta membangun kepercayaan publik (public trust) yang merupakan modal penting

dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Denhardt & Denhardt, 2015). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital, tetapi juga oleh penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen sosial aparatur. Integrasi antara inovasi teknologi, pembangunan karakter aparatur, dan kepedulian sosial menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (SMEP) memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). SMEP mampu mengubah mekanisme monitoring pembangunan dari yang bersifat manual dan periodik menjadi berbasis digital dan real-time, sehingga memudahkan pemantauan capaian fisik dan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan terukur. Meskipun demikian, implementasi SMEP masih menghadapi beberapa tantangan, seperti integrasi sistem yang belum optimal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam analisis data, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan program selanjutnya. SMEP merupakan inovasi positif dalam mendukung transformasi digital pemerintahan daerah dan berpotensi menjadi praktik baik yang dapat dikembangkan serta direplikasi di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, M. (2020) *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 15th edn. London: Kogan Page.
- Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. (2015) *The New Public Service: Serving, Not Steering*. 4th edn. New York: Routledge.
- Few, S. (2013) *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring*. 2nd edn. Burlingame: Analytics Press.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2019) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heeks, R. (2006) *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. London: Sage Publications.
- Hood, C. (1995) 'The "New Public Management" in the 1980s: Variations on a Theme', *Accounting, Organizations and Society*, 20(2-3), pp. 93-109.

- Indrajit, R.E. (2016) *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrajit, R.E. (2016) *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Iskandar, D., Prasetyo, E. and Wibowo, A. (2017) 'Sistem informasi kinerja sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas sektor publik', *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), pp. 123–135.
- Mardiasmo (2018) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nam, T. and Pardo, T.A. (2011) 'Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions', *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*, pp. 282–291.
- Rahmawati, L., Suryanto, T. and Nugroho, A. (2024) 'Budaya organisasi dan penguatan kinerja aparatur sektor publik', *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 8(1), pp. 45–58.
- Steps, S. (2004) *Human Resource Development and Learning Organizations*. New York: McGraw-Hill.